

Dialektika Positivisme dan Teori Kritis dalam Ilmu Sosial

Dida Maulidya Al Afshana^{1*}, Agung Winarno², Subagyo³

¹⁻³Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dida.maulidya.2504138@students.um.ac.id

Abstract. *This study examines the dialectic between positivism and critical theory as two major paradigms shaping the development of modern social science epistemology. Positivism, with its emphasis on objectivity, empirical verification, and causal laws, has become the foundation for systematic and measurable scientific research methods. However, the dominance of this paradigm has drawn criticism from critical theorists, highlighting positivism's limitations in understanding the historical, ideological, and power relations that influence social reality. This study aims to analyze the dialectical relationship between the two paradigms by examining their contributions, fundamental differences, and potential integration in the development of social science methodology. The method used is a conceptual-based literature review, through a review of relevant philosophical and methodological literature. The research findings indicate that positivism and critical theory not only represent paradigmatic opposition but also provide complementary opportunities for developing a more holistic approach to social research. Positivism plays a role in providing empirical rigor, while critical theory offers a reflective framework for understanding meaning, ideology, and power structures.*

Keywords: *Critical Theory; Epistemology; Paradigm Dialectic; Positivism; Social Science.*

Abstrak. Penelitian ini membahas dialektika antara positivisme dan teori kritis sebagai dua paradigma utama yang membentuk perkembangan epistemologi ilmu sosial modern. Positivisme, dengan penekanannya pada objektivitas, verifikasi empiris, dan hukum sebab-akibat, telah menjadi fondasi bagi metode penelitian ilmiah yang sistematis dan terukur. Namun, dominasi paradigma tersebut menimbulkan kritik dari teori kritis yang menyoroti keterbatasan positivisme dalam memahami dimensi historis, ideologis, dan relasi kekuasaan yang memengaruhi realitas sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan dialektis antara kedua paradigma tersebut dengan mengkaji kontribusi, perbedaan mendasar, dan potensi integrasinya dalam pengembangan metodologi ilmu sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan berbasis penelitian konseptual, melalui penelaahan literatur filosofis dan metodologis yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa positivisme dan teori kritis tidak hanya merepresentasikan pertentangan paradigmatis, tetapi juga menyediakan peluang komplementer untuk membangun pendekatan penelitian sosial yang lebih holistik. Positivisme berperan dalam menyediakan ketelitian empiris, sedangkan teori kritis menawarkan kerangka reflektif untuk memahami makna, ideologi dan struktur kekuasaan.

Kata kunci: Dialektika Paradigma; Epistemologi; Ilmu Sosial; Positivisme; Teori Kritis.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu sosial modern tidak dapat dilepaskan dari perdebatan paradigmatis yang berlangsung antara positivisme dan teori kritis (Ramadhani & Winarno, 2024). Positivisme, yang berakar pada pemikiran Auguste Comte, menempatkan observasi empiris, objektivitas serta verifikasi sebagai fondasi utama dalam proses produksi pengetahuan (Mayadah, 2022). Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial bersifat objektif dan dapat dipahami melalui prosedur ilmiah yang sistematis sebagaimana ilmu alam. Dominasi positivisme selama abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 menjadikannya kerangka epistemologis utama dalam penelitian sosial. Namun, pendekatan ini kemudian dikritik karena dinilai reduksionistik serta kurang mampu menangkap dimensi historis, ideologis dan subjektif yang melekat pada tindakan manusia.

Kritik tersebut mencapai bentuk teoretis yang lebih sistematis melalui kemunculan teori kritis yang dipelopori oleh para pemikir Mazhab Frankfurt seperti Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno (Fajarni, 2022). Berangkat dari analisis terhadap kapitalisme modern dan rasionalitas instrumental, teori kritis menegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah bebas nilai dan selalu terkait dengan relasi kekuasaan yang membentuk struktur sosial. Paradigma ini menolak klaim objektivitas absolut yang diasumsikan positivisme serta menempatkan penelitian sosial tidak hanya sebagai upaya menjelaskan fenomena, tetapi juga sebagai instrumen refleksi dan emansipasi manusia. Dengan demikian, teori kritis menghadirkan orientasi baru dalam ilmu sosial yang berfokus pada pembongkaran ideologi serta upaya transformasi sosial (Sholahudin, 2020).

Dialektika antara positivisme dan teori kritis kemudian menjadi perdebatan epistemologis penting dalam tradisi ilmu sosial kontemporer. Meskipun keduanya tampak berseberangan, hubungan keduanya bersifat saling melengkapi dalam kerangka perkembangan metodologi penelitian. Positivisme menyediakan perangkat empiris yang memungkinkan pengujian sistematis terhadap realitas sosial, sedangkan teori kritis memberikan landasan reflektif untuk memahami bagaimana pengetahuan dan struktur kekuasaan saling terkait (Irawati et al., 2021). Interaksi dialektis tersebut membuka ruang bagi pengembangan pendekatan penelitian yang lebih holistik yang tidak hanya memperhatikan fakta empiris, tetapi juga mempertimbangkan makna, kepentingan ideologis dan dampak sosial dari proses produksi pengetahuan.

Melihat pentingnya perdebatan paradigmatis tersebut, penelitian mengenai Dialektika Positivisme dan Teori Kritis dalam Ilmu Sosial menjadi relevan untuk memahami bagaimana epistemologi penelitian sosial terus berkembang. Penelitian ini tidak hanya menguraikan perbedaan mendasar antara kedua paradigma, tetapi juga menyoroti bagaimana interaksi kritis di antara keduanya membentuk landasan metodologis bagi studi-studi sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi, keterbatasan, serta hubungan dialektis antara positivisme dan teori kritis dalam membangun pengetahuan sosial yang lebih reflektif, kritis dan transformatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Positivisme merupakan aliran filsafat yang muncul pada abad ke-19 dan dipelopori oleh sosiolog Prancis, Auguste Comte. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap spekulasi metafisis dan teologis yang mendominasi pemikiran pada masa sebelumnya. Dalam karya monumentalnya yang berjudul *The Course of Positive Philosophy* (1830–1842 M), Comte

mengemukakan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan metode ilmiah yang sistematis. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung melalui tiga tahap, yakni tahap teologis, metafisis, dan positif (Nugroho, 2016). Tahap positif dianggap sebagai puncak perkembangan intelektual, di mana manusia tidak lagi mencari penjelasan melalui hal-hal supranatural, melainkan berdasarkan hukum-hukum alam yang dapat diuji secara ilmiah. Positivisme kemudian menjadi landasan metodologis bagi ilmu-ilmu sosial dan alam, menekankan pentingnya objektivitas, verifikasi empiris, serta penolakan terhadap spekulasi metafisis. Pengaruhnya meluas hingga ke bidang sosiologi, psikologi, ekonomi dan ilmu politik, menjadikan positivisme sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Positivisme secara etimologi berasal dari kata *positive*, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realita (Irawati et al., 2021). Ini berarti, apa yang disebut sebagai positif bertentangan dengan apa yang hanya ada di dalam angan-angan (impian) atau terdiri dari apa yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia.

Posisi kuat positivisme sebagai paradigma dominan dalam ilmu pengetahuan modern kemudian memunculkan kritik dari sejumlah pemikir yang menilai bahwa pendekatan tersebut terlalu menekankan objektivitas, pengukuran dan verifikasi empiris, sehingga mengabaikan dimensi historis, ideologis dan relasi kekuasaan yang membentuk realitas sosial. Dominasi positivisme dalam penelitian sosial dipandang berpotensi mereduksi kompleksitas tindakan manusia menjadi hubungan sebab-akibat yang bersifat mekanistik serta mengabaikan makna subjektif dan struktur sosial yang memengaruhi pengalaman manusia. Kritik inilah yang pada akhirnya melandasi lahirnya teori kritis, sebuah aliran pemikiran yang berupaya menantang asumsi dasar positivisme dan menawarkan pendekatan alternatif yang lebih reflektif terhadap pengetahuan dan perubahan sosial (Fajarni, 2022). Teori kritis berkembang melalui pemikiran para anggota Mazhab Frankfurt seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer, yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai dan selalu terkait dengan ideologi serta kepentingan sosial tertentu (Luthfiyah, 2018). Dengan demikian, kemunculan teori kritis dapat dipahami sebagai respons epistemologis dan filosofis terhadap keterbatasan positivisme dalam menjelaskan dinamika sosial modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*conceptual research*), yang berfokus pada penelusuran, pengkajian, serta pemahaman mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan dengan positivisme dan teori kritis dalam ilmu sosial, khususnya bidang penelitian manajemen. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris, melainkan bertujuan untuk membangun argumentasi teoretis melalui telaah sistematis terhadap konsep-konsep filosofis yang menjadi fondasi perdebatan dalam ilmu sosial. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan penalaran logis, refleksi kritis serta integrasi konseptual sebagai dasar penyusunan argumentasi ilmiah, tanpa penggunaan teknik statistik atau data numerik sesuai karakteristik penelitian konseptual dalam tradisi kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisme

Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada (*exist*) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam (*natural laws*) (Nugroho, 2016). Positivisme merupakan aliran filsafat yang menitikberatkan perhatian pada metodologi dengan menggantikan kedudukan pengetahuan melalui penerapan metode ilmu alam yang berkembang pesat sejak masa renaissance dan aufklarung sebagai dasar refleksi epistemologis terhadap pengetahuan manusia tentang kenyataan (Hardiman, 2012). Dapat disimpulkan pengertian positivisme secara terminologis berarti merupakan suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi atau nyata adanya.

Dalam konteks analisis penelitian sosial, positivisme memandang masyarakat sebagai entitas objektif yang dapat dipelajari dengan pendekatan yang serupa dengan ilmu alam (Mayadah, 2022). Fenomena sosial dianggap sebagai hubungan sebab-akibat yang stabil, dapat diukur, dan dapat diprediksi melalui prosedur empiris yang sistematis. Melalui kerangka demikian, peneliti diasumsikan mampu mengambil posisi netral dan bebas nilai (*value-free*), sehingga temuan penelitian sepenuhnya merefleksikan fakta objektif yang melekat pada realitas. Pandangan ini sekaligus menempatkan generalisasi dan verifikasi sebagai tujuan utama dalam penelitian sosial, sehingga menghasilkan bentuk pengetahuan yang bersifat universal dan replikatif. Namun demikian, positivisme juga menghadirkan dialektika epistemologis yang relevan dalam konteks penelitian sosial. Ketergantungannya pada

objektivitas, netralitas dan pengukuran kuantitatif sering kali mengabaikan sifat dinamis, kontekstual dan penuh makna dari tindakan sosial manusia (Giddens, 1984). Fenomena sosial tidak hanya merupakan kejadian empiris yang dapat diobservasi, tetapi juga mengandung dimensi interpretatif, historis dan simbolik yang tidak dapat direduksi menjadi variabel mekanistik. Dialektika ini menimbulkan pertanyaan kritis “sejauh mana pendekatan positivisme mampu menangkap kompleksitas realitas sosial yang sarat nilai dan makna?”. Pertanyaan ini menjadi landasan penting dalam evaluasi metodologis terhadap peran dan keterbatasan positivisme.

Di sisi lain, positivisme tetap memiliki kontribusi signifikan dalam penelitian sosial modern. Paradigma ini menyediakan kerangka metodologis yang ketat, sistematis dan berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga memungkinkan peneliti menghasilkan temuan yang terukur, teruji dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan publik maupun keputusan manajerial. Dalam banyak konteks, positivisme menjadi dasar pengembangan teori-teori sosial empiris yang berpengaruh, serta memberikan landasan kuat bagi praktik penelitian kuantitatif yang menekankan reliabilitas dan validitas. Dengan demikian, meskipun menuai kritik, positivisme tetap menempati posisi penting dalam lanskap epistemologi penelitian sosial.

Melalui dialektika tersebut, positivisme dalam penelitian sosial dapat dipahami bukan hanya sebagai metodologi empiris, tetapi juga sebagai konstruksi epistemologis yang membentuk cara peneliti memandang realitas sosial. Interaksi kritis antara kekuatan dan keterbatasannya menghasilkan ruang refleksi metodologis mengenai bagaimana pengetahuan sosial harus dihasilkan, dimaknai dan digunakan. Dengan demikian, pembahasan mengenai positivisme menjadi langkah awal dalam memahami dinamika epistemologi penelitian sosial, terutama ketika paradigma ini didialogkan dengan pendekatan alternatif yang menekankan subjektivitas, interpretasi dan kritik terhadap struktur sosial.

Teori Kritis

Teori kritis atau *critical theory* merupakan suatu aliran pengembangan keilmuan yang didasarkan pada suatu konsepsi kritis terhadap berbagai pemikiran dan pandangan yang sebelumnya ditemukan sebagai paham keilmuan lainnya (Muslih, 2004). Theodor Adorno dan Max Horkheimer (2002) dalam *Dialectic of Enlightenment* menggambarkan bahwa teori kritis berfokus pada analisis ideologi yang digunakan untuk mempertahankan dominasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat kapitalis modern (Ramadhani & Winarno, 2024). Salah satu prinsip utama teori kritis adalah kritik terhadap apa yang mereka sebut sebagai “rasionalitas instrumental” yaitu cara berpikir yang menilai segala sesuatu berdasarkan kegunaan praktis dan efisiensi, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan, etika maupun kebebasan individu.

Teori kritis berupaya memperkenalkan bentuk rasionalitas yang lebih holistik dan emansipatoris yang menekankan kesadaran kritis dan pembebasan manusia dari struktur sosial yang menindas.

Dalam konteks analisis penelitian sosial, teori kritis menolak asumsi netralitas dan objektivitas yang menjadi fondasi paradigma positivisme (Muslih, 2004). Bagi para pemikir kritis, ilmu pengetahuan tidak pernah benar-benar bebas nilai, karena selalu dipengaruhi oleh kepentingan ideologis, politik dan ekonomi yang melandasi proses produksi pengetahuan. Dengan demikian, teori kritis menggeser fokus penelitian dari sekadar menggambarkan realitas sosial secara empiris menjadi upaya memahami bagaimana struktur kekuasaan membentuk pengalaman manusia. Perspektif ini memberikan landasan epistemologis bagi penelitian sosial yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga transformatif.

Dialektika teori kritis dalam penelitian sosial terlihat jelas melalui pandangannya mengenai hubungan antara pengetahuan, kekuasaan dan emansipasi. Teori kritis berargumen bahwa penelitian tidak boleh berhenti pada analisis fenomena, tetapi juga harus mengungkap bagaimana ideologi bekerja untuk mempertahankan dominasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat (Friesen, 2008). Melalui pendekatan dialektis, teori kritis menempatkan realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak statis melainkan hasil konstruksi historis yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Dengan demikian, penelitian sosial harus mampu menghadirkan pemahaman yang reflektif-kritis terhadap struktur sosial yang menciptakan ketidakadilan. Di samping itu, teori kritis menekankan pentingnya partisipasi subjek dalam proses pemaknaan realitas (Rizkwanti & Caspari, 2024). Manusia tidak dipandang sebagai objek pasif, tetapi sebagai agen yang memiliki kemampuan refleksi dan tindakan transformatif. Oleh karena itu, penelitian sosial yang berlandaskan teori kritis mendorong penggunaan metode yang bersifat dialogis, interpretatif dan partisipatoris, seperti *critical ethnography* atau *participatory action research* (Siswadi & Syaifuddin, 2024). Pendekatan ini bertujuan mengungkap pengalaman subjektif yang selama ini terpinggirkan oleh struktur dominan sekaligus memungkinkan munculnya kesadaran kritis sebagai dasar perubahan sosial.

Melalui dialektika tersebut, teori kritis dalam penelitian sosial tidak hanya menjadi alat analisis terhadap fenomena sosial, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang mengarahkan penelitian menuju pembebasan dan transformasi sosial. Paradigma ini menegaskan bahwa ilmu sosial bukan sekadar alat untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya. Dengan demikian, teori kritis memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakupan epistemologi penelitian sosial menuju orientasi yang lebih reflektif, humanistik dan emansipatoris.

Hubungan Positivisme dan Teori Kritis dalam Ilmu Sosial

Hubungan antara positivisme dan teori kritis dalam ilmu sosial bersifat dialektis, karena kedua paradigma tersebut berangkat dari asumsi ontologis dan epistemologis yang berbeda, namun saling berinteraksi dalam membentuk perkembangan pemikiran sosial modern (Kurniawati et al., 2021). Positivisme memandang realitas sosial sebagai entitas objektif yang dapat diamati, diukur dan dijelaskan melalui hukum-hukum yang dapat digeneralisasikan, sedangkan teori kritis memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi historis yang sarat dengan relasi kekuasaan dan ideologi. Perbedaan mendasar ini tidak membuat keduanya sepenuhnya terpisah, melainkan menciptakan ruang dialog konseptual yang memungkinkan pengayaan metodologis dalam penelitian sosial. Dalam kerangka tersebut, positivisme memberikan dasar bagi perkembangan metode empiris yang sistematis dan berbasis evidensi yang kemudian menjadi pijakan awal bagi teori kritis dalam menilai bagaimana pengetahuan diproduksi dan digunakan dalam masyarakat. Bagi pemikir Frankfurt, dominasi paradigma positivistik berfungsi sebagai contoh konkret bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mempertahankan struktur kekuasaan tertentu. Di sisi lain, kritik tersebut justru memperlihatkan peran positivisme dalam membangun tradisi ilmiah yang memungkinkan evaluasi reflektif terhadap proses produksi pengetahuan itu sendiri.

Hubungan dialektis antara positivisme dan teori kritis dalam ilmu sosial tidak semata-mata menunjukkan pertentangan, tetapi memperlihatkan dinamika epistemologis yang saling melengkapi. Teori kritis merespons positivisme tentang objektivitas dan bebas nilai dengan menegaskan bahwa pengetahuan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik dan ekonomi, namun tetap mengakui pentingnya pendekatan empiris positivisme untuk memahami fakta sosial secara sistematis. Karena itu, penelitian sosial idealnya mengintegrasikan ketelitian metodologis positivisme dengan analisis reflektif-normatif teori kritis, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya faktual tetapi juga mampu mengungkap makna, kekuasaan dan implikasi ideologis yang membentuk realitas sosial (Setiawan, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dialektika positivisme dan teori kritis tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami kompleksitas realitas sosial. Positivisme memberikan dasar metodologis yang kuat melalui orientasinya pada pengukuran empiris, observasi sistematis dan klaim objektivitas, sehingga mampu menggambarkan fakta sosial secara terstruktur. Sedangkan teori kritis

menekankan perlunya kesadaran reflektif terhadap hubungan kekuasaan, ideologi serta konstruksi sosial yang memengaruhi proses produksi pengetahuan. Integrasi antara keduanya membuka ruang bagi pendekatan penelitian yang lebih komprehensif karena memungkinkan penggabungan deskripsi empiris dengan analisis normatif serta interpretasi kritis. Dengan demikian, dialektika kedua paradigma ini memperluas cakrawala penelitian sosial, tidak hanya dalam memahami fenomena yang tampak secara empiris, tetapi juga dalam menelaah makna dan konsekuensi sosial yang tersembunyi di baliknya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji relevansi dan penerapan dialektika kedua paradigma ini dalam konteks penelitian sosial kontemporer, khususnya pada isu-isu yang melibatkan ketimpangan sosial, kebijakan publik dan dinamika kekuasaan di masyarakat. Selain itu, peneliti disarankan untuk mengintegrasikan prosedur observasi dan pengukuran yang sistematis dengan refleksi teoritis yang mendalam agar hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi fakta, tetapi juga mampu memberikan pemaknaan yang lebih transformatif bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Fajarni, S. (2022). Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian pemikiran 3 (tiga) generasi serta kritik terhadap positivisme, sosiologi, dan masyarakat modern. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 72–95. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.13045>
- Friesen, N. (2008). Critical theory. *Ubiquity*, 2(2). <https://doi.org/10.1145/1403922.1386860>
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Hardiman, B. (2012). *Melampaui modernitas dan positivisme*. Kanisius.
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, pospositivisme, teori kritis, dan konstruktivisme dalam perspektif epistemologi Islam. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870–880. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>
- Kurniawati, A., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). Teori kritis dan dialektika pencerahan Max Horkheimer. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 124–135. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i2.2281>
- Luthfiyah, L. (2018). Kritik modernitas menuju pencerahan: Perspektif teori kritis Mazhab Frankfurt. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2(1), 275–285. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v2i1.101>
- Mayadah, U. (2022). Positivisme Auguste Comte. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26576>
- Muslih, M. (2004). *Filsafat ilmu: Kajian atas asumsi dasar*. Belukar.
- Nugroho, I. (2016). Positivisme Auguste Comte: Analisa epistemologis dan nilai etisnya terhadap sains. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 167–177. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192>

- Ramadhani, A., & Winarno, A. (2024). Transformasi pembelajaran dengan teknologi: Analisis kritis dari lensa teori post-positivisme, kritis, dan konstruktivisme. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 312–323. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.399>
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan studi kritis dan relevansinya terhadap kebijakan publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 44–60. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53728>
- Setiawan, P. A. (2024). Positivisme sebagai era baru filsafat dan pengaruhnya dalam kajian sosial Islam. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 16(2), 330–341. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v16i2.3431>
- Sholahudin, U. (2020). Membedah teori kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, asumsi, dan kontribusinya terhadap perkembangan teori ilmu sosial. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 71–89. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>
- Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian tindakan partisipatif metode PAR (Participatory Action Research): Tantangan dan peluang dalam pemberdayaan komunitas. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174>